E-ISSN: 3025-0994
Halaman 3248-3263
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Islam

Wilda Hidayah[1], Hartono[2], Moh. Khusnuridlo[3]

[1,2,3] Program Magister Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia
e-mail: wildahidayah11@gmail.com, hartono2986@gmail.com
khusnuridlo@uinkhas.ac.id

Abstrak

Sarana dan prasarana merupakan unsur yang mendukung mutu pembelajaran, keselamatan, kenyamanan, dan pembentukan karakter peserta didik pada lembaga pendidikan Islam. Artikel ini bertujuan menguraikan konsep, landasan nilai, tahapan, tata kelola pendanaan, pemeliharaan, serta tantangan perencanaan sarana dan prasarana pendidikan Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Literatur dipilih dari buku, artikel jurnal, dan regulasi pendidikan, kemudian dianalisis melalui identifikasi tema, pengelompokan informasi, serta sintesis konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa perencanaan yang efektif perlu dimulai dengan pemetaan kondisi aset dan analisis kebutuhan berbasis data, dilanjutkan dengan penghimpunan usulan, penentuan skala prioritas, penyelarasan terhadap visi lembaga dan kemampuan anggaran, serta penyusunan program jangka pendek, menengah, dan panjang. Proses tersebut perlu dilaksanakan secara partisipatif dengan pembagian tanggung jawab yang jelas dan berlandaskan nilai amanah, ihsan, syura, keadilan, serta kemaslahatan. Perencanaan juga harus mencakup aksesibilitas, keselamatan bangunan, kebutuhan pembelajaran digital, inventarisasi, dan pemeliharaan berkala agar pengadaan tidak menimbulkan pemborosan. Tantangan utama meliputi keterbatasan dana, kapasitas pengelola, dokumentasi aset yang belum tertib, dan ketergantungan pada sumber pembiayaan tertentu. Artikel ini merekomendasikan diversifikasi pendanaan yang akuntabel, penggunaan inventarisasi digital, pelatihan pengelola, evaluasi berkala, serta pelibatan guru, peserta didik, orang tua, yayasan, dan masyarakat. Dengan demikian, perencanaan dapat menjadi proses berkelanjutan yang responsif terhadap kebutuhan akademik dan spiritual sekaligus meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya pendidikan.

Kata Kunci: Perencanaan, Sarana Dan Prasarana, Pendidikan Islam, Manajemen Pendidikan Islam, Madrasah

Abstract

Educational facilities and infrastructure are essential components that support learning quality, safety, comfort, and character development in Islamic educational institutions. This

article aims to explain the concepts, value foundations, stages, funding management, maintenance, and challenges of planning facilities and infrastructure in Islamic education. This study employs a qualitative approach using a literature review method. Relevant books, journal articles, and educational regulations were examined through thematic identification, information classification, and conceptual synthesis. The findings indicate that effective planning should begin with asset condition mapping and data-based needs analysis, followed by collecting proposals, establishing priorities, aligning plans with institutional vision and budget capacity, and developing short-term, medium-term, and long-term programs. The process should be participatory, with clearly defined responsibilities and guided by the Islamic values of amanah (trustworthiness), ihsan (excellence), shura (consultation), justice, and public benefit. Planning should also incorporate accessibility, building safety, digital learning needs, asset inventory, and regular maintenance to prevent unnecessary expenditure. Major challenges include limited funding, inadequate management capacity, poorly organized asset documentation, and dependence on particular funding sources. This article recommends accountable funding diversification, digital inventory systems, staff training, periodic evaluation, and the involvement of teachers, students, parents, foundations, and communities. Therefore, planning can become a sustainable process that responds to academic and spiritual needs while improving the effective utilization of educational resources.

Keywords: *Planning, Educational Facilities And Infrastructure, Islamic Education, Facilities Management, Madrasah.*

LATAR BELAKANG

Pendidikan tidak hanya bergantung pada kurikulum dan pendidik, tetapi juga pada ketersediaan fasilitas yang memadai. Ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, masjid, asrama, hingga perangkat teknologi informasi merupakan sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif (Ula & Rohman, 2024). Mutu sarana dan prasarana juga berkorelasi dengan mutu pendidikan yang diselenggarakan sebuah lembaga (Harini et al., 2024). Di lembaga pendidikan Islam, fasilitas tersebut tidak sekadar urusan administratif, melainkan juga bagian dari upaya memberikan layanan terbaik (ihsan) dan menjaga amanah pengelolaan sumber daya (Subhan et al., 2025).

Secara operasional, fasilitas yang memadai perlu dipahami sebagai fasilitas yang tersedia, layak digunakan, aman, mudah diakses, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ruang kelas yang cukup, pencahayaan dan ventilasi yang baik, sanitasi, air bersih, perpustakaan, laboratorium, serta konektivitas digital membentuk lingkungan yang memungkinkan kegiatan belajar berlangsung lebih efektif. Karena itu, penilaian kebutuhan tidak cukup didasarkan pada jumlah barang, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi, kapasitas, tingkat pemanfaatan, aksesibilitas, dan kesesuaiannya dengan karakteristik peserta didik. Perspektif ini sejalan dengan perhatian internasional terhadap pentingnya infrastruktur dasar dan lingkungan belajar yang aman sebagai bagian dari kualitas pendidikan (UNESCO, 2026).

Kewajiban menyediakan fasilitas pendidikan juga memiliki dasar hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang perkembangan potensi peserta didik (Khumayroh et al., 2025). Dalam praktik pengelolaan, standar sarana dan prasarana pada setiap jenjang pendidikan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 (Harini et al., 2024). Dengan demikian, perencanaan sarana dan prasarana bukan sekadar pilihan manajerial, melainkan bagian dari pemenuhan standar yang harus dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga.

Dalam penerapan regulasi, lembaga perlu menggunakan ketentuan yang berlaku dan tidak hanya mengandalkan pedoman lama. Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 mengatur standar sarana dan prasarana bagi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta menggantikan sejumlah ketentuan sebelumnya, termasuk Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007. Oleh sebab itu, pengelola perlu memeriksa kesesuaian fasilitas dengan regulasi terbaru, kondisi bangunan, kebutuhan peserta didik, dan ketentuan aksesibilitas. Bagi madrasah dan sekolah Islam, pemenuhan standar umum perlu dipadukan dengan kebutuhan pembelajaran agama dan budaya lembaga, tanpa mengurangi aspek keselamatan dan inklusivitas.

Perencanaan menempati posisi awal dalam siklus manajemen sarana dan prasarana. Tahapan yang lazim dikenal meliputi perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penghapusan, serta pengawasan dan pertanggungjawaban (Noviyanti, 2025). Kualitas tahap-tahap berikutnya sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan. Pengadaan yang tidak berpijak pada analisis kebutuhan akan melahirkan pemborosan anggaran, sedangkan perencanaan yang tidak memperhitungkan pemeliharaan akan membuat fasilitas cepat menurun kondisinya. Pengelolaan yang tepat memungkinkan adanya perencanaan yang matang terkait perawatan dan penggantian fasilitas yang mulai menurun fungsinya (Azom et al., 2024).

Siklus manajemen fasilitas juga perlu dipahami sebagai rangkaian keputusan yang saling memengaruhi. Keputusan pengadaan akan menentukan biaya operasional dan pemeliharaan pada tahun-tahun berikutnya, sedangkan pencatatan aset membantu lembaga mengetahui barang yang masih layak, perlu diperbaiki, atau harus diganti. Dengan demikian, perencanaan sebaiknya menggunakan pendekatan biaya sepanjang umur pakai, bukan semata-mata memilih barang dengan harga pembelian terendah. Perencanaan yang mempertimbangkan biaya pemeliharaan, ketersediaan suku cadang, kemudahan penggunaan, serta risiko kerusakan dapat mengurangi beban anggaran jangka panjang dan menjaga keberlangsungan layanan pendidikan.

Lembaga pendidikan Islam memiliki kebutuhan yang khas. Sekolah Islam terpadu, misalnya, menuntut fasilitas yang tidak hanya mendukung kegiatan akademik, tetapi juga pembinaan karakter Islami, seperti ruang tahfidz dan musala yang representatif (Khumayroh et al., 2025). Perhatian terhadap fasilitas ini pun bukan hal baru: tata kelola sarana dan prasarana pendidikan secara Islami telah dikenal sejak masa Rasulullah melalui pengadaan Rumah Arqam, kuttab, dan masjid sebagai pusat pembelajaran (Masrukhan & Sa'diyah, 2024). Karena itu, perencanaan sarana dan prasarana di lembaga pendidikan Islam perlu mempertimbangkan dimensi teknis, sosial, dan spiritual secara terpadu.

Kebutuhan khas tersebut perlu ditetapkan berdasarkan profil dan model layanan masing-masing lembaga. Pesantren berasrama, misalnya, membutuhkan perencanaan yang terintegrasi antara ruang belajar, tempat tinggal, sanitasi, dapur, layanan kesehatan, tempat ibadah, dan ruang pembinaan. Sekolah Islam nonasrama mungkin lebih memprioritaskan ruang kelas, musala, ruang praktik ibadah, perpustakaan, dan fasilitas teknologi pembelajaran. Perbedaan kebutuhan ini menegaskan bahwa perencanaan tidak tepat jika hanya meniru daftar fasilitas lembaga lain. Keputusan harus didasarkan pada jumlah peserta didik, kurikulum, kegiatan harian, kondisi geografis, kemampuan keuangan, serta rencana pengembangan lembaga.

Persoalan yang dihadapi lembaga pendidikan Islam antara lain keterbatasan pendanaan, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, dan pengelolaan yang belum optimal (Valentino et al., 2026). Gambaran di lapangan menguatkan hal ini. Pada sebuah madrasah tsanawiyah swasta di daerah terpencil, sebagian ruang kelas masih memerlukan perbaikan, peralatan laboratorium dan koleksi perpustakaan terbatas, serta akses internet belum memadai (Azom et al., 2024). Masih banyak pula sekolah yang belum mampu memelihara dan mengoptimalkan fasilitasnya secara efektif (Farida & Safira, 2026).

Tantangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan sarana dan prasarana tidak selalu dapat diselesaikan dengan menambah jumlah barang atau membangun gedung baru. Dalam kondisi anggaran terbatas, perbaikan tata kelola sering kali sama pentingnya dengan penambahan aset. Pengelola dapat memulai dengan audit sederhana terhadap ruang dan barang, penyusunan daftar kerusakan, pemetaan frekuensi pemakaian, dan penentuan kebutuhan yang paling mendesak. Hasil pemetaan perlu dijadikan dasar pembahasan anggaran agar keputusan tidak hanya didorong oleh usulan yang paling kuat, melainkan oleh urgensi, dampak terhadap pembelajaran, risiko keselamatan, dan jumlah penerima manfaat.

Sebagian besar penelitian terdahulu terfokus pada lembaga pendidikan umum tanpa mempertimbangkan kebutuhan khas lembaga berbasis Islam (Khumayroh et al., 2025). Di sisi lain, kajian pada madrasah dan sekolah Islam yang tersedia umumnya membahas manajemen sarana dan prasarana secara menyeluruh, sehingga tahap perencanaan sering hanya mendapat porsi singkat. Artikel ini mengisi celah tersebut dengan menempatkan perencanaan sebagai pokok bahasan.

Kajian ini juga memperluas pembahasan dengan menempatkan perencanaan sebagai fungsi strategis yang menghubungkan standar pendidikan, nilai Islam, kemampuan pembiayaan, dan keberlanjutan aset. Sejumlah kajian sebelumnya membahas manajemen fasilitas secara umum, termasuk pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi, dan pengawasan (Fajarani et al., 2021; Nugroho et al., 2023; Vikasari et al., 2024; Zamrud, 2024; Srifariyati et al., 2024). Artikel ini memberi perhatian lebih khusus pada bagaimana keputusan awal disusun, siapa yang dilibatkan, bagaimana prioritas ditetapkan, dan bagaimana hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki rencana berikutnya.

Ruang lingkup pembahasan meliputi konsep dan tujuan perencanaan, nilai-nilai Islam yang menjadi dasar pengambilan keputusan, tahapan penyusunan kebutuhan, partisipasi dan kepemimpinan, sumber pembiayaan, serta integrasi pemeliharaan dan inventarisasi. Pembahasan juga mempertimbangkan tuntutan aksesibilitas dan keselamatan agar fasilitas dapat digunakan secara adil oleh peserta didik dengan kebutuhan yang beragam. Dengan

cakupan tersebut, artikel diharapkan membantu pengelola menyusun rencana yang tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program kerja, anggaran, penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, dan indikator evaluasi yang jelas.

METODE

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Sumber data terdiri atas satu buku induk manajemen perlengkapan sekolah dan artikel jurnal ilmiah terbitan 2021 sampai 2026 yang membahas manajemen sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan Islam. Sumber ditelusuri melalui mesin pencari akademik dan portal jurnal dengan kata kunci "perencanaan sarana dan prasarana", "pendidikan Islam", dan "madrasah". Data dianalisis dengan teknik analisis isi yaitu mengidentifikasi tema, mengelompokkan temuan, lalu mensintesisnya menjadi uraian konseptual.

Penelusuran literatur dilakukan dengan kata kunci yang berkaitan dengan perencanaan fasilitas pendidikan, manajemen sarana dan prasarana, pendidikan Islam, madrasah, pemeliharaan aset, dan standar sarana prasarana. Literatur dipertimbangkan berdasarkan relevansi terhadap fokus artikel, kejelasan informasi bibliografis, dan kontribusinya dalam menjelaskan konsep maupun praktik perencanaan. Sumber yang digunakan mencakup artikel jurnal, buku manajemen perlengkapan sekolah, dan regulasi yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas pendidikan. Analisis dilakukan secara tematik: informasi tentang konsep, nilai, proses, pendanaan, pemeliharaan, dan tantangan dikelompokkan, dibandingkan, kemudian disintesiskan menjadi rekomendasi konseptual. Karena penelitian ini merupakan studi pustaka, artikel tidak mengklaim melakukan pengukuran langsung terhadap kondisi seluruh lembaga pendidikan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Sarana dan Prasarana serta Perencanaannya

Sarana pendidikan mencakup perangkat yang digunakan langsung dalam pembelajaran, sedangkan prasarana mencakup fasilitas yang menunjang berlangsungnya proses tersebut secara tidak langsung. Manajemen sarana dan prasarana dipahami sebagai proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, dan penghapusan fasilitas pendidikan secara terorganisasi dan profesional (Noviyanti, 2025). Dalam rujukan klasik manajemen perlengkapan sekolah, Bafadal (2008) menempatkan perencanaan sebagai langkah pertama yang menjadi dasar bagi pengadaan, inventarisasi, dan pemeliharaan.

Pembedaan antara sarana dan prasarana memiliki konsekuensi terhadap bentuk perencanaan. Sarana pembelajaran seperti buku, alat peraga, komputer, dan perangkat laboratorium biasanya berkaitan langsung dengan kegiatan belajar, sedangkan prasarana seperti lahan, gedung, jaringan listrik, sanitasi, dan akses jalan menjadi kondisi pendukung agar kegiatan dapat berlangsung. Dalam praktiknya, keduanya tidak dapat dipisahkan sepenuhnya seperti laboratorium, misalnya, memerlukan peralatan sekaligus ruang, ventilasi, instalasi listrik, dan prosedur keselamatan. Karena itu, daftar kebutuhan idealnya disusun berdasarkan fungsi layanan atau kegiatan, bukan sekadar daftar barang yang terpisah-pisah.

Perencanaan sarana dan prasarana dapat didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan fasilitas, menetapkan prioritas, dan menyusun langkah pemenuhannya agar sejalan dengan tujuan lembaga dan kemampuan anggaran. Dengan definisi ini, perencanaan bukan sekadar daftar belanja, melainkan keputusan strategis tentang fasilitas apa yang paling dibutuhkan, kapan diadakan, dan bagaimana dibiayai. Perencanaan juga bukan berhenti pada dokumen: rencana harus terus dikawal hingga benar-benar terlaksana agar tujuan yang diharapkan tercapai (Khumayroh et al., 2025).

Dokumen perencanaan yang baik setidaknya memuat nama kebutuhan, alasan pengajuan, kondisi fasilitas yang tersedia, jumlah pengguna, tingkat urgensi, perkiraan biaya, sumber pendanaan, waktu pelaksanaan, unit penanggung jawab, dan indikator keberhasilan. Format tersebut membantu pimpinan membandingkan usulan dari berbagai unit secara lebih objektif. Misalnya, pengadaan proyektor dapat diprioritaskan apabila mendukung banyak kelas dan fasilitas yang tersedia tidak mencukupi; sementara renovasi struktur bangunan harus memperoleh prioritas tinggi apabila berkaitan dengan keselamatan. Keputusan akhir tetap perlu mempertimbangkan standar yang berlaku dan kemampuan pendanaan, tetapi dasar pertimbangannya harus terdokumentasi.

Jenis sarana yang direncanakan memengaruhi cara menyusun rencananya. Berdasarkan sifat penggunaannya, sarana dibedakan menjadi sarana habis pakai, seperti spidol dan alat tulis kantor, serta sarana tahan lama, seperti meja, bangku, dan peralatan elektronik. Berdasarkan sifat geraknya, sarana dibedakan menjadi sarana bergerak, seperti lemari dan bangku, serta sarana tetap, seperti lahan, gedung, dan taman (Khumayroh et al., 2025). Untuk barang habis pakai, perencanaan berupa catatan kebutuhan setiap unit kelas disertai taksiran anggaran untuk periode tertentu. Untuk barang tahan lama, daftar kebutuhan disusun dengan memperhitungkan barang yang masih layak pakai minimal setahun ke depan, lalu prioritas pengadaan ditentukan berdasarkan anggaran dan tingkat urgensi. Adapun sarana tetap, seperti tanah dan bangunan, memerlukan perencanaan strategis jangka panjang (Khumayroh et al., 2025).

Klasifikasi fasilitas juga dapat diperluas menurut tingkat urgensi dan risiko. Fasilitas kritis adalah sarana atau prasarana yang apabila rusak dapat mengganggu keselamatan atau menghentikan layanan utama, seperti instalasi listrik, struktur bangunan, sanitasi, dan akses keluar darurat. Fasilitas penting mendukung kegiatan pembelajaran inti, sedangkan fasilitas penunjang meningkatkan kenyamanan atau memperluas layanan. Pengelompokan ini bukan untuk mengabaikan kebutuhan penunjang, melainkan untuk menjelaskan urutan pemenuhan ketika anggaran tidak mencukupi seluruh usulan. Setiap kategori sebaiknya disertai kriteria penilaian yang transparan.

Tujuan perencanaan pun dapat dirumuskan secara lebih terperinci. Menurut Bafadal sebagaimana dikutip Khumayroh et al. (2025), perencanaan dilakukan agar pengadaan sesuai kebutuhan sebenarnya sehingga tidak terjadi pemborosan, agar penggunaan fasilitas efisien dan tepat guna, serta agar pemeliharaan dilakukan secara cermat. Dengan kata lain, perencanaan yang baik mencegah kesalahan dan kegagalan sebelum biaya dikeluarkan.

Selain mencegah pemborosan, perencanaan berfungsi mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Data kebutuhan yang terukur dapat menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan, proposal bantuan, serta laporan

pertanggungjawaban kepada yayasan, pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Perencanaan yang konsisten juga memudahkan evaluasi karena lembaga dapat membandingkan kebutuhan yang direncanakan, anggaran yang disetujui, realisasi pengadaan, dan manfaat yang dihasilkan. Dengan demikian, keberhasilan tidak hanya dinilai dari terserapnya anggaran atau bertambahnya aset, tetapi dari ketepatan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan fungsi fasilitas.

Landasan Nilai Islam dalam Perencanaan

Perbedaan khas perencanaan sarana dan prasarana di lembaga pendidikan Islam terletak pada landasan nilainya. Subhan et al. (2025) menjelaskan bahwa manajemen mutu sarana dan prasarana dalam pendidikan Islam berlandaskan nilai ihsan, amanah, syura, istiqamah, dan profesionalisme. Nilai amanah menuntut pertanggungjawaban atas sumber daya, ihsan mendorong penyediaan layanan terbaik, dan syura mewujud dalam pengambilan keputusan yang partisipatif.

Amanah dapat diterjemahkan menjadi penggunaan dana sesuai tujuan, pencatatan aset yang dapat diperiksa, serta keterbukaan terhadap hasil pelaksanaan. Ihsan menuntut mutu dan kehati-hatian, termasuk memastikan barang yang dibeli sesuai spesifikasi dan benar-benar dapat digunakan. Syura berarti keputusan penting dibahas bersama pihak yang memahami kebutuhan dan pihak yang bertanggung jawab atas pembiayaan. Sementara itu, prinsip keadilan dan maslahah menuntut agar alokasi fasilitas tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi memperhatikan kebutuhan peserta didik, guru, tenaga kependidikan, serta kelompok yang membutuhkan dukungan akses khusus. Nilai-nilai ini dapat dijadikan kriteria praktis dalam menilai setiap usulan.

Senada dengan itu, Valentino et al. (2026) menemukan bahwa kepemimpinan yang visioner, adaptif, partisipatif, dan berlandaskan nilai tauhid, amanah, al-'adalah, ihsan, serta al-maslahah meningkatkan efektivitas perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan sarana prasarana. Dengan demikian, nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai kompas etis: perencanaan harus adil, bermanfaat bagi peserta didik, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepemimpinan yang baik tidak berarti seluruh keputusan harus dipusatkan pada kepala madrasah. Pemimpin perlu membangun prosedur agar informasi dari guru, tenaga administrasi, petugas kebersihan, peserta didik, orang tua, dan pengelola yayasan dapat dihimpun serta dipertimbangkan. Pada saat yang sama, kewenangan perlu dibatasi secara jelas: kebutuhan rutin dapat diputuskan pada tingkat unit sesuai pagu, sedangkan pembangunan besar, perubahan tata ruang, atau pembelian bernilai tinggi memerlukan persetujuan pimpinan dan yayasan. Pembagian kewenangan seperti ini menjaga partisipasi tanpa menghilangkan akuntabilitas.

Landasan nilai ini memiliki pijakan dalam sumber-sumber keagamaan. Khumayroh et al. (2025) mengaitkan konsep perencanaan dengan QS. Al-Hasyr ayat 18, yang mengingatkan setiap orang agar memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ayat ini dipahami sebagai dorongan untuk berpikir jauh ke depan, termasuk dalam menyiapkan fasilitas pendidikan. Mereka juga merujuk QS. An-Nahl ayat 90 tentang keadilan dan kebajikan sebagai pegangan agar setiap keputusan perencanaan mengutamakan

manfaat bagi banyak orang dan menghindari keburukan. Pada saat yang sama, perencanaan perlu fleksibel sehingga dapat disesuaikan ketika kondisi di lapangan berubah (Khumayroh et al., 2025).

Nilai Islam juga tampak pada standar yang dijadikan acuan. Pada SMP Nurhasanat Boarding School Karawang, kelengkapan sarana dan prasarana dinilai masih perlu disempurnakan sesuai standar syariat dan tata letak fasilitas, misalnya pemisahan ruang kelas, asrama, dan kamar mandi santri putra dan putri (Masrukhan & Sa'diyah, 2024). Temuan ini memperlihatkan bahwa nilai Islam tidak berhenti pada tataran semangat, tetapi menjadi kriteria teknis dalam menentukan desain dan penataan fasilitas.

Tahapan Perencanaan

Berdasarkan sintesis sumber, perencanaan sarana dan prasarana pendidikan Islam dapat dijabarkan dalam empat tahap, ditambah umpan balik evaluasi yang menghubungkan satu siklus perencanaan dengan siklus berikutnya.

1. Analisis kebutuhan.
   Subhan et al. (2025) menegaskan bahwa pengembangan sarana dan prasarana perlu direncanakan melalui analisis kebutuhan. Praktik di MTs Negeri 1 Bandar Lampung memberi gambaran konkret: evaluasi kebutuhan dilakukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan, baik dari observasi langsung maupun laporan guru dan tenaga kependidikan, dan biasanya dilaksanakan menjelang akhir tahun ajaran sebagai dasar rencana tahun berikutnya (Noviyanti, 2025). Di MA Miftahut Thullab Sampang, analisis dilakukan oleh wakil kepala bidang sarana dan prasarana bersama seluruh guru (Farida & Safira, 2026). Di MTs Swasta Nurul Huda Muaro Jambi, kepala madrasah tidak hanya mengandalkan laporan staf, tetapi juga menilai langsung kondisi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan area olahraga (Azom et al., 2024).
2. Penghimpunan usulan dan penetapan prioritas.
   Kepala madrasah bersama wakil kepala bidang sarana dan prasarana mengoordinasikan pertemuan dengan dewan guru, tata usaha, bendahara, dan komite madrasah untuk menginventarisasi kebutuhan prioritas (Noviyanti, 2025). Tahap ini sejalan dengan kerangka perencanaan perlengkapan sekolah yang dikenal dalam literatur manajemen perlengkapan, yakni menampung usulan, menyusun rencana kebutuhan, lalu memadukannya dengan sumber daya yang tersedia (Bafadal, 2008). SDIT Putra Pakuan Bogor menjadikannya agenda rutin berupa rapat koordinasi dua kali setahun, pada awal semester ganjil dan genap, yang melibatkan ketua yayasan, kepala sekolah, guru, tata usaha, serta petugas keamanan dan kebersihan. Hasilnya berupa program kerja semesteran dengan prioritas utama pembangunan masjid sekolah baru karena masjid lama tidak lagi menampung warga sekolah (Khumayroh et al., 2025).
3. Penyelarasan dengan anggaran dan rencana kerja.
   Rencana kebutuhan dipadukan dengan ketersediaan anggaran, misalnya melalui dokumen rencana anggaran madrasah, kemudian usulan dipilah berdasarkan urgensi dan manfaatnya bagi pembelajaran (Noviyanti, 2025). Ma'mun (2024) pada kajiannya di madrasah unggulan menunjukkan bahwa pengadaan harus sesuai dengan rencana kerja madrasah yang telah disusun, sehingga rencana menjadi acuan pelaksanaan dan

pengendalian. Pada pengadaan masjid di SDIT Putra Pakuan, penyelarasan ini dimulai dari penyusunan desain dan rencana anggaran biaya yang rinci, disertai kajian teknis atas lahan, aksesibilitas lokasi, dan dampak terhadap lingkungan sekitar (Khumayroh et al., 2025). Di MA Miftahut Thullab, rencana anggaran diajukan kepada yayasan untuk disetujui sebelum pengadaan dilakukan (Farida & Safira, 2026), sedangkan kepala MTs Nurul Huda menyusun proposal yang jelas dan terstruktur untuk memperoleh dukungan yayasan dan pemerintah (Azom et al., 2024).

4. Penyusunan rencana berjenjang.
   Subhan et al. (2025) mengemukakan bahwa rencana pengembangan perlu sejalan dengan visi dan misi lembaga. Rencana yang disusun dalam bentuk jangka pendek, menengah, dan panjang membantu lembaga tidak hanya bereaksi terhadap kerusakan, tetapi menjalankan strategi pengembangan fasilitas secara bertahap dan berkelanjutan. Pola bertahap tampak pada MA Miftahut Thullab yang menambah fasilitas dari tahun ke tahun, yakni perpustakaan pada 2021, laboratorium komputer dengan lima komputer dan satu proyektor pada 2023, jaringan Wi-Fi serta kipas angin di setiap kelas pada 2024, dan renovasi total bangunan kelas putri serta penambahan ruang kelas pada 2025 (Farida & Safira, 2026). Pembangunan masjid di SDIT Putra Pakuan juga dilakukan bertahap, mulai dari pondasi, struktur utama, hingga interior dan perlengkapan ibadah (Khumayroh et al., 2025).

Evaluasi menjadi penghubung antarsiklus. Di MA Miftahut Thullab, rapat evaluasi dilaksanakan dua kali setahun pada masa libur semester, dengan cara mengamati ulang sarana yang ada, mencatat yang rusak atau perlu diperbaiki, lalu menjadikan hasilnya bahan perencanaan tahun berikutnya (Farida & Safira, 2026). Dengan demikian, perencanaan bersifat siklus, bukan peristiwa tahunan yang berdiri sendiri.

Partisipasi dan Kepemimpinan

Perencanaan yang baik bersifat partisipatif. Di MTs Negeri 1 Bandar Lampung, pengambilan keputusan untuk sarana utama seperti ruang kelas, laboratorium, atau media pembelajaran dilakukan secara partisipatif, sedangkan kebutuhan pendukung cenderung diputuskan secara internal oleh pimpinan madrasah dan yayasan (Noviyanti, 2025). Temuan ini menunjukkan perlunya batas kewenangan yang jelas agar prinsip syura tetap terjaga tanpa memperlambat keputusan. Peran pemimpin menjadi kunci, karena strategi kepemimpinan berbasis nilai Islam disebut sebagai faktor yang menentukan pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif dan berkelanjutan (Valentino et al., 2026).

Sumber lain memperlihatkan variasi peran. Di MTs Swasta Nurul Huda, kepala madrasah sering mengadakan rapat dengan guru dan komite serta mendorong keikutsertaan semua anggota sehingga setiap pendapat didengar. Suasana kolaboratif ini membantu keputusan menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan siswa (Azom et al., 2024). Di MA Miftahut Thullab, wakil kepala bidang sarana dan prasarana menjadi tokoh sentral yang dibantu guru dan staf, sementara persetujuan akhir berada pada yayasan (Farida & Safira, 2026). Di SDIT Putra Pakuan, rapat dipimpin ketua yayasan bersama kepala sekolah, kemudian dilanjutkan sesi diskusi tempat guru dan tata usaha memberi masukan (Khumayroh et al., 2025). Ma'mun (2024) juga mencatat bahwa peran setiap pemangku kepentingan menentukan mutu

pendidikan dari sisi sarana dan prasarana. Dari ketiga contoh tersebut tampak bahwa kejelasan pembagian peran antara kepala madrasah, wakil kepala bidang sarana dan prasarana, dan yayasan merupakan syarat agar partisipasi berjalan efektif.

Sumber Pendanaan dalam Perencanaan

Perencanaan yang realistis harus memetakan sumber dana. Subhan et al. (2025) menyebut Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana masyarakat, wakaf produktif, dan corporate social responsibility (CSR) sebagai sumber utama pengadaan yang perlu dikelola secara transparan dan akuntabel. Di MTs Negeri 1 Bandar Lampung, dana BOS menjadi sumber utama, sementara komite madrasah turut memberi dukungan dana tambahan untuk fasilitas non-akademik (Noviyanti, 2025). Diversifikasi pendanaan penting karena ketergantungan pada satu sumber membatasi kemampuan lembaga memenuhi standar fasilitas.

Praktik diversifikasi dapat dilihat pada beberapa lembaga. MA Miftahut Thullab memperoleh dana dari BOS sekitar Rp77,85 juta per tahun, unit usaha berupa toko pakaian sebesar Rp20 juta sampai Rp25 juta per tahun, dana hibah, serta sumbangan alumni dan masyarakat. Dana BOS tetap menjadi porsi terbesar (Farida & Safira, 2026). Di SDIT Putra Pakuan, pembagian fungsi lebih jelas: dana internal yayasan dialokasikan untuk kebutuhan besar seperti pembangunan gedung atau renovasi besar, sedangkan dana BOS dipakai untuk kebutuhan operasional rutin seperti alat tulis, pemeliharaan ringan, dan barang habis pakai. Pembangunan masjid baru dibiayai gabungan dana yayasan, sumbangan orang tua melalui komite, dan donatur masyarakat (Khumayroh et al., 2025). Adapun kepala MTs Nurul Huda aktif menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk memperoleh bantuan dana dan sumber daya lain (Azom et al., 2024).

Pembagian fungsi semacam itu patut dijadikan pelajaran perencanaan yaitu setiap sumber dana dicocokkan dengan jenis kebutuhan yang paling sesuai, sehingga dana rutin tidak terkuras untuk proyek besar dan sebaliknya. Transparansi penggunaan dana juga perlu dijaga agar nilai amanah tidak sekadar slogan.

Pemeliharaan, Inventarisasi, dan Penghapusan Sebagai Bagian dari Rencana

Rencana yang hanya memuat pengadaan akan menyisakan masalah pada tahap berikutnya. Di MTs Negeri 1 Bandar Lampung, pemeliharaan masih bersifat reaktif karena belum ada tim khusus, jadwal rutin, maupun prosedur operasional baku (Noviyanti, 2025). Sebaliknya, beberapa lembaga lain telah memasukkan pemeliharaan ke dalam sistem kerja. SMP Nurhasanat Boarding School membagi pemeliharaan menjadi tiga tingkat: ringan secara harian oleh petugas kebersihan kelas dan asrama, sedang menyesuaikan kebutuhan dengan anggaran tahunan, dan berat berupa perbaikan bangunan secara berkala (Masrukhan & Sa'diyah, 2024). SDIT Putra Pakuan memiliki staf khusus pemeliharaan yang bertanggung jawab kepada kepala tata usaha dan yayasan, ditambah kegiatan Jumat bersih sebulan sekali yang melibatkan seluruh warga sekolah (Khumayroh et al., 2025). Kepala MTs Nurul Huda membentuk tim pemeliharaan dari guru dan staf untuk inspeksi rutin dan membuka jalur pelaporan kerusakan secara langsung (Azom et al., 2024).

Inventarisasi menjadi fondasi data bagi perencanaan berikutnya. SDIT Putra Pakuan mencatat jumlah dan kondisi barang di setiap unit ruang, memberi kode dan label pada setiap barang, lalu merekamnya dalam buku besar manual atau spreadsheet digital. Hasilnya dilaporkan kepada yayasan dan Dinas Pendidikan, serta dipakai menentukan pemeliharaan, pengadaan ulang, dan penghapusan agar tidak terjadi pembelian barang yang sebenarnya masih tersedia (Khumayroh et al., 2025). MA Miftahut Thullab mencatat barang ke dalam buku inventarisasi dan membuat kode barang (Farida & Safira, 2026). Untuk penghapusan, SDIT Putra Pakuan menyeleksi barang usang secara internal dan, bila masih bernilai guna, menjualnya atau melakukan tukar tambah, dengan informasi yang disebarkan melalui grup WhatsApp internal (Khumayroh et al., 2025).

Implikasinya jelas: rencana sarana dan prasarana yang baik memuat tiga lapis sekaligus, yaitu rencana pengadaan, rencana pemeliharaan dengan jadwal dan penanggung jawab, serta rencana pencatatan aset. Dengan begitu, perencanaan tidak berhenti pada daftar kebutuhan baru, tetapi menjaga nilai guna fasilitas yang sudah ada.

Perencanaan yang Memperhatikan Kebutuhan Khas Lembaga Islam

Fasilitas di lembaga pendidikan Islam sering memiliki fungsi ganda, yakni akademik sekaligus pembinaan keagamaan. Di SDIT Putra Pakuan, keputusan membangun masjid yang lebih luas dipandang bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi spiritual dan pendidikan jangka panjang yang sejalan dengan visi sekolah membentuk pribadi unggul berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Masjid diposisikan sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pembinaan karakter (Khumayroh et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa prioritas rencana dapat ditentukan oleh visi keagamaan lembaga, bukan semata oleh jumlah pengguna.

Pada pesantren dan sekolah berasrama, perencanaan juga menyangkut tata ruang. SMP Nurhasanat Boarding School Karawang berdiri di atas lahan wakaf seluas 3,4 hektare yang dibagi untuk masjid, gedung sekolah, perkantoran dan aula, serta hunian. Kegiatan tahfidz dipusatkan di bangunan masjid. Pengelola memisahkan kelas dan asrama santri putra dan putri, menyediakan kamar mandi dengan sekat privasi, dan menjaga kebersihan serta kesucian fasilitas melalui jadwal piket dan petugas kebersihan (Masrukhan & Sa'diyah, 2024). Meskipun demikian, kajian yang sama mencatat bahwa standar bangunan tahan gempa dan penangkal petir belum memadai, serta laboratorium MIPA, balai latihan kerja, dan laboratorium bahasa belum berjalan maksimal (Masrukhan & Sa'diyah, 2024). Temuan ini mengingatkan bahwa perencanaan harus memasukkan aspek keselamatan dan kelengkapan fasilitas pendukung, di samping aspek syariat, sejak tahap desain.

Sintesis Praktik pada Lembaga yang Dikaji

Tabel 1 merangkum praktik perencanaan sarana dan prasarana pada lima lembaga yang dibahas dalam sumber kajian ini. Ringkasan tersebut memperlihatkan pola yang berulang, yaitu rapat bersama pemangku kepentingan, penyusunan prioritas berdasarkan urgensi dan anggaran, serta persetujuan yayasan, dengan kendala yang juga berulang pada pendanaan dan tata kelola data.

Tabel 1. Ringkasan Praktik Perencanaan Sarana dan Prasarana pada Lembaga Pendidikan Islam

Sumber dan Lembaga	Praktik Perencanaan	Kendala atau Catatan
Noviyanti (2025); MTs Negeri 1 Bandar Lampung	Evaluasi kebutuhan menjelang akhir tahun ajaran; rapat kepala madrasah dengan dewan guru, tata usaha, bendahara, dan komite; usulan dipilah berdasarkan urgensi; dana BOS sebagai sumber utama.	Pemeliharaan masih reaktif karena belum ada tim khusus, jadwal rutin, dan prosedur operasional baku.
Khumayroh et al. (2025); SDIT Putra Pakuan Bogor	Rapat koordinasi dua kali setahun; prioritas pembangunan masjid baru; rencana anggaran biaya dan kajian teknis lahan; dana yayasan, komite, dan donatur.	Biaya perawatan dan pengadaan besar sehingga sebagian program tahun sebelumnya belum terealisasi.
Masrukhan & Sa'diyah (2024); SMP Nurhasanat Boarding School Karawang	Analisis kebutuhan, pembiayaan, dan prioritas; pemanfaatan lahan wakaf; pemeliharaan tiga tingkat (ringan, sedang, berat).	Standar bangunan tahan gempa dan penangkal petir belum memadai; laboratorium MIPA, BLK, dan bahasa belum optimal.
Azom et al. (2024); MTs Swasta Nurul Huda Muaro Jambi	Kepala madrasah mengidentifikasi kebutuhan bersama guru dan komite; proposal terstruktur kepada yayasan dan pemerintah; kerja sama pihak ketiga.	Anggaran terbatas; dokumentasi kurang terstruktur; partisipasi warga madrasah dan pelatihan pengelola masih minim.
Farida & Safira (2026); MA Miftahut Thullab Sampang	Rapat kolaboratif; analisis kebutuhan oleh wakil kepala bidang sarpras dan guru; rencana anggaran diajukan ke yayasan; evaluasi dua kali setahun menjadi bahan perencanaan berikutnya.	Dana dari BOS, toko madrasah, hibah, dan sumbangan alumni; fasilitas ditambah bertahap pada 2021 sampai 2025.

Dari tabel tampak bahwa lembaga dengan perencanaan yang melibatkan banyak pihak dan memiliki mekanisme evaluasi cenderung dapat menambah fasilitas secara berkelanjutan. Sementara itu, lembaga yang dokumentasinya belum tertib atau pemeliharaannya belum dijadwalkan menghadapi kesulitan menilai kebutuhan secara akurat.

Tantangan dan Implikasinya

Beberapa tantangan menonjol muncul dari sumber-sumber yang dikaji. Pertama, keterbatasan dana dan kapasitas sumber daya manusia (Valentino et al., 2026; Subhan et al., 2025). Di SDIT Putra Pakuan, besarnya kebutuhan biaya perawatan dan pengadaan membuat sebagian program yang direncanakan pada tahun sebelumnya tidak dapat direalisasikan secara optimal (Khumayroh et al., 2025). Di MTs Nurul Huda, anggaran yang terbatas berdampak pada perawatan ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan (Azom et al., 2024).

Kedua, kelemahan pada tahap lanjutan akibat perencanaan yang belum memasukkan pemeliharaan: di MTs Negeri 1 Bandar Lampung, pemeliharaan masih bersifat reaktif karena belum ada tim khusus, jadwal rutin, maupun prosedur operasional baku (Noviyanti, 2025). Ketiga, dokumentasi dan partisipasi. Di MTs Nurul Huda, data penggunaan ruang kelas dan laboratorium tidak tercatat dengan baik sehingga menyulitkan penyusunan jadwal, kekurangan tenaga administrasi yang kompeten menjadi hambatan, dan siswa kurang memiliki rasa memiliki terhadap fasilitas. Orang tua juga jarang dilibatkan, dan pelatihan manajemen sarana prasarana bagi guru dan staf belum memadai (Azom et al., 2024). Keempat, kebutuhan modernisasi, termasuk inventarisasi digital dan teknologi pembelajaran (Subhan et al., 2025; Valentino et al., 2026).

Implikasinya, rencana sarana dan prasarana perlu memuat program pemeliharaan, pelatihan pengelola, dan sistem pencatatan aset sejak awal, bukan hanya rencana pengadaan. Ma'mun (2024) juga mencatat bahwa peran setiap pemangku kepentingan menentukan mutu pendidikan dari sisi sarana dan prasarana, sehingga pembagian tugas dalam rencana harus eksplisit. Azom et al. (2024) menyarankan kerja sama yang lebih baik antara madrasah, pemerintah daerah, dan masyarakat, dokumentasi kondisi sarana yang lebih terstruktur, pelatihan bagi guru dan staf, serta dorongan partisipasi siswa dan orang tua agar tumbuh rasa tanggung jawab bersama. Selain itu, pelaporan sebaiknya tidak hanya administratif, tetapi juga analitis dengan menyertakan evaluasi dan proyeksi kebutuhan jangka panjang agar membantu penyusunan strategi penganggaran dan komunikasi dengan pemberi dana (Khumayroh et al., 2025).

Kerangka Implementasi Perencanaan yang Berkelanjutan

Berdasarkan sintesis pembahasan, implementasi perencanaan dapat dituangkan dalam kerangka kerja yang menghubungkan kebutuhan, keputusan, pembiayaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada awal periode, pengelola melakukan pemeriksaan kondisi fasilitas dan memperbarui inventaris. Hasilnya dibahas bersama unit pengguna untuk membedakan kebutuhan mendesak, kebutuhan peningkatan mutu, dan kebutuhan pengembangan. Selanjutnya, usulan dinilai menggunakan kriteria yang telah disepakati, dipadukan dengan rencana kerja dan anggaran, lalu disahkan sesuai kewenangan. Pada tahap pelaksanaan, spesifikasi, jadwal, penanggung jawab, serta bukti pengadaan atau perbaikan harus terdokumentasi.

Kerangka ini perlu dilengkapi dengan mekanisme pemantauan sederhana. Pimpinan dapat meninjau realisasi program secara berkala dan membandingkannya dengan target. Jika suatu program tertunda, alasan penundaan dan dampaknya terhadap layanan perlu

dicatat, kemudian diputuskan apakah program dijadwalkan ulang, disesuaikan, atau diganti dengan alternatif yang lebih layak. Pada akhir periode, evaluasi dilakukan terhadap kondisi fasilitas dan manfaatnya bagi pembelajaran, bukan hanya terhadap penyerapan anggaran. Hasil evaluasi menjadi masukan bagi rencana periode berikutnya sehingga proses perencanaan terus berkembang sesuai kebutuhan.

Kerangka implementasi tersebut dapat diterapkan secara bertahap, termasuk oleh lembaga dengan sumber daya terbatas. Langkah awal tidak harus berupa penggunaan perangkat lunak yang kompleks; daftar inventaris yang konsisten, formulir usulan, jadwal pemeliharaan, dan laporan evaluasi yang sederhana sudah dapat memperbaiki kualitas keputusan. Setelah tata kelola dasar berjalan, lembaga dapat mengembangkan sistem digital, analisis biaya jangka panjang, dan indikator kinerja yang lebih rinci. Prinsip utamanya adalah memastikan bahwa setiap pengeluaran mempunyai dasar kebutuhan, setiap aset memiliki penanggung jawab, dan setiap program dapat dievaluasi manfaatnya.

SIMPULAN

Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan Islam merupakan proses sistematis yang dimulai dari analisis kebutuhan, dilanjutkan penghimpunan usulan dan penetapan prioritas, penyelarasan dengan anggaran dan rencana kerja, serta penyusunan rencana berjenjang yang sejalan dengan visi dan misi lembaga. Proses ini dijiwai nilai amanah, ihsan, syura, dan maslahah, serta ditopang kepemimpinan yang partisipatif dengan pembagian peran yang jelas antara kepala madrasah, wakil kepala bidang sarana dan prasarana, dan yayasan. Agar efektif, perencanaan perlu memuat strategi pendanaan yang beragam dan dicocokkan dengan jenis kebutuhan, program pemeliharaan yang terjadwal, serta sistem inventarisasi yang dapat ditelusuri. Lembaga pendidikan Islam juga perlu memperhitungkan kebutuhan khas berupa fasilitas ibadah dan tahfidz, tata ruang yang sesuai standar syariat, dan aspek keselamatan bangunan. Evaluasi berkala hendaknya dijadikan bahan penyusunan rencana berikutnya. Secara praktis, pimpinan lembaga disarankan menetapkan kalender perencanaan dan pemeliharaan, membangun basis data inventaris yang diperbarui secara rutin, menyiapkan matriks prioritas yang transparan, serta melatih petugas terkait. Pengembangan fasilitas hendaknya mempertimbangkan standar yang berlaku, aksesibilitas bagi peserta didik penyandang disabilitas, keselamatan bangunan, kebutuhan pembelajaran digital, dan karakter pendidikan Islam. Keterbatasan kajian ini terletak pada penggunaan sumber sekunder sehingga tidak dapat memastikan keseragaman praktik seluruh lembaga. Penelitian berikutnya dapat menggunakan observasi, wawancara, dan studi komparatif pada madrasah atau pesantren di berbagai wilayah untuk menguji rekomendasi ini dalam konteks nyata. Penelitian ini terbatas pada kajian kepustakaan sehingga belum menguji temuan di lapangan. Penelitian lanjutan disarankan berupa studi lapangan pada madrasah dan pesantren di wilayah Jember untuk menguji temuan kepustakaan ini dalam konteks lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Azom, I., Muslih, & Rianti, I. (2024). Manajemen Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Pendidikan. *El-Idare: Journal Of Islamic Education Management,* *10*(2), 84–90.

Https://Jurnal.Radenfatah.Ac.Id/Index.Php/Elidare/Article/Download/25108/7889/77840

Bafadal, I. (2008). *Manajemen Perlengkapan Sekolah: Teori Dan Aplikasinya*. Bumi Aksara.

Barnawi, & Arifin, M. (2012). Manajemen Sarana Dan Prasarana Sekolah. Ar-Ruzz Media.

Farida, S., & Safira, I. M. (2026). Manajemen Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Fasilitas Layanan Pembelajaran Di MA Miftahut Thullab Daleman Kedungdung Sampang. *Al-Allam: Jurnal Pendidikan,* *7*(1), 55–62. Https://Ejournal.Kopertais4.Or.Id/Madura/Index.Php/Alallam/Article/View/8556

Gunawan, I., & Benty, D. D. N. (2017). Manajemen Pendidikan: Suatu Pengantar Praktik. Alfabeta.

Harini, H., Zukhrufin, F. K., & Qoyimmah Wahyusi, H. D. (2024). Manajemen Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. *JIE (Journal Of Islamic Education), 9*(1). Https://Doi.Org/10.52615/Jie.V9i1.329

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.

Khumayroh, S., Mujahidin, E., Andriana, N., & Kamal, M. R. (2025). Perencanaan Sarana Prasarana Lembaga Pendidikan Di SDIT Putra Pakuan Bogor. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam,* *8*(02), 1103–1122. Https://Doi.Org/10.30868/Im.V8i02.8661

Ma'mun, S. M. (2024). Management Of Facilities And Infrastructure In Improving Services And Quality Of Education At The Al-Azhar Pagerwojo Leading Madrasah. *Al-Mudarris, 7*(2). Https://Doi.Org/10.32478/8pv8sy41

Masrukhan, L., & Sa'diyah, M. (2024). Perencanaan Sarana Prasarana Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SMP Nurhasanat Boarding School Karawang. *Idarah Tarbawiyah: Journal Of Management In Islamic Education,* *5*(1), 70–76. Https://Doi.Org/10.32832/Idarah.V5i2.16141

Matin, & Fuad, N. (2016). Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan: Konsep Dan Aplikasinya. Rajawali Pers.

Mulyasa, E. (2012). Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah. Bumi Aksara.

Noviyanti, R. (2025). Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bandar Lampung. *El-Idare: Journal Of Islamic Education Management, 11*(2), 1–7.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Subhan, Aminullah, M., Alaydrus, S. A. J., & Maimun. (2025). Manajemen Mutu Pengembangan Sarana Dan Prasarana Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, 10*(4b), 365–373. Https://Doi.Org/10.29303/Jipp.V10i4b.4293

Ula, K. I., & Rohman, T. (2024). Peran Manajemen Sarana Dan Prasarana Dalam Menciptakan Lingkungan Belajar Yang Kondusif Di Lembaga Pendidikan Islam.

EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, *3*(4), 1628–1637. Https://Doi.Org/10.56799/Ekoma.V3i4.3509

Valentino, M. D., Azzahra, R. S., Syifak, M. N., & Sadad, D. A. (2026). Strategi Kepemimpinan Dalam Optimalisasi Sarana Dan Prasarana Di Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai,* *10*(2), 19210–19214. Https://Doi.Org/10.31004/Jptam.V10i2.41200